

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan bentuk pemerintahan mandiri yang dilakukan oleh berbagai daerah dalam mengelola dan mengembangkan daerah sendiri. Indonesia menjalankan otonomi daerah lebih spesifik dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sumatera Barat dalam menyikapi otonomi dengan nama *babaliak ka nagari*. Kembalinya konsep pemerintahan di Sumatera Barat ditandai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yg kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dimana berlandaskan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*”.

Bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya pemerintahan yang mandiri, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Perkembangan pemberdayaan daerah pada saat sekarang sudah mulai mewujudkan daerah yang madani (*Civil Society*)¹.Indonesia memiliki tradisi kuat dalam penerapan *civil*

¹ Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, 2016, Wacana Civil Society (Masyarkat Madani) Di Indonesia, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol 10 (2): 50

society (Masyarakat Madani). Bahkan jauh sebelum bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang di wakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam merebut kemerdekaan². Bahkan Indonesia pada masa pemerintahan Habibie telah membentuk satu tim berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998, tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani. Tim tersebut bertugas dalam membahas masalah-masalah pokok yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat madani³. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diragukan oleh masyarakat karena konsep ini di anggap sebagai reaksi terhadap pemerintahan yang militeristik yang dibangun oleh rezim Orde Baru.

Perkembangan konsep daerah madani mulai kembali diterapkan di beberapa daerah. Akan tetapi, daerah dalam mewujudkan konsep daerah madani pada umumnya belum memiliki konsep atau ukuran yang jelas. Ubaedillah mengatakan daerah atau masyarakat yang madani memiliki unsur pokok yaitu; wilayah publik yang jelas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, keadilan sosial⁴. Kabupaten Agam adalah salah satu daerah yang telah membuat konsep dan ukuran mereka sendiri dalam mewujudkan daerah yang madani. Hal tersebut juga di sampaikan oleh tim ahli GNM di Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

“Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang telah memiliki konsep dan ukuran dari daerah madani. Konsep daerah madani berdasarkan pada syariat Islam dan budaya Minangkabau. Penyusunan program instrumen dilakukan dengan cara diskusi dalam menyepakati definisi nagari

² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana, Jakarta, hlm 227.

³ Ibid, hlm 51

⁴ Op.cit hlm 225

madani, menentukan kriteria, dan indikator pengukur nagari madani”. (Wawancara dengan Henmaidi selaku tim ahli GNM di Kabupaten Agam Pada Tanggal 02 Februari 2020 pada pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Agam adalah daerah yang telah berhasil merumuskan konsep daerah atau nagari madani dalam memberdayakan pemerintah nagari dan masyarakat. Penerapan konsep daerah atau nagari madani diwujudkan melalui program Gerakan Nagari Madani (GNM). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPM/N) Kabupaten Agam merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Gerakan Nagari Madani. Sedangkan pelaksana dalam kegiatan adalah Nagari dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APB Nagari, dan sumber lainnya.

Gerakan Nagari Madani tertuang dalam visi Kabupaten Agam yaitu “Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”. Serta program Gerakan Nagari Madani menjadi misi pertama dan salah satu program prioritas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Tujuan dari adanya Gerakan Nagari Madani adalah untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (ABS-SBK) guna mewujudkan karakter masyarakat yang madani⁵.

⁵ Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani

Konsep pemberdayaan nagari yang madani hampir sama dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Konsep IDM dan GNM dalam pelaksanaan memiliki tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat dalam membangun atau mengembangkan potensi daerah. Perbedaan antara kedua program ini adalah GNM memiliki instrumen sendiri dalam memberdayakan daerah atau nagari Kabupaten Agam dalam mewujudkan masyarakat madani di Kabupaten Agam. Program Nagari Madani terdiri dari 7 kriteria dan terbagi atas 43 indikator yang harus dipenuhi oleh Nagari. Kriteria merupakan satuan pengukuran nagari dalam memberdayakan masyarakat dan pemerintahan nagari. Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani melingkupi semua nagari di Kabupaten Agam.

Permasalahan dalam yang dialami beberapa daerah adalah terfokus pada pembangunan fisik serta melupakan konsep budaya yang mereka pegang. Seperti Pandawa dalam penelitiannya tahun 2017 mengatakan bahwa dari hasil di lapangan menunjukkan bahwa sasaran program Gerakan Desa Membangun dan Dana Desa dalam Membangun di Kecamatan Malintau Utara belum efektif, dimana pembangunan fisik lebih di utamakan dari pada pemberdayaan masyarakat⁶. Annisa, dkk dalam penelitiannya pada tahun 2019 mengatakan program pelaksanaan IDM di nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiak, Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pembangunan fisik dari pada pemberdayaan masyarakat⁷. Selanjutnya Sune dalam penelitiannya di tahun 2019 mengatakan bahwa kinerja

⁶ Helmi Pandawa, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun Dan Dana Desa Dalam Membangun Desa Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, *Journal Raissance*, Vol 2 (2): 239

⁷ Annisa Aulia Putri, dkk. 2019. Sistem Tata Kelola Pemerintahan Nagari Dalam Mendiptakan Public Value Di nagari Sungai Nyalo Iv Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 4 (1): 115

kepala desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik Desa Sidorukun Kecamatan Randangan masih bermasalah⁸. Program Gerakan Nagari Madani di harapkan dapat mengembangkan pembangunan nagari baik itu pembangunan fisik ataupun non fisik.

GNM menekankan pada konsep pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada falsafah Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (ABS-SBK). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam karena Kabupaten Agam merupakan daerah yang menerapkan konsep mereka sendiri dalam memberdayakan masyarakat dan pemerintahan nagari dalam mewujudkan daerah yang madani. Tujuan dirumuskannya satuan ukuran agar terdapatnya kejelasan dalam memberikan definisi, kriteria, dan indikator daerah yang madani bagi 16 kecamatan dengan nagari berjumlah 82 Nagari di Kabupaten Agam.

Program Gerakan Nagari Madani muncul di latar belakang oleh pudarnya falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan nagari. Pudarnya prinsip ABS-SBK disebabkan oleh arus negatif globalisasi serta adanya pengaruh budaya luar yang merubah pola kehidupan masyarakat. Pengaruh globalisasi yang bersifat negatif bagi norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar⁹.

⁸ Umar Sune, 2019, Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 11 (3): 244

⁹ Dyah Satya Yoga Agustin. 2011. Penurunan Rasa Cinta Budaya Dan Nasionalisme Generasi Muda Akibat Globalisasi. *Jurnal sosial huminora*, Vol 4 (2): 184

Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani di atur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani, menjelaskan tujuan, sasaran, penerapan Gerakan Nagari Madani, Evaluasi, pembinaan, dan pembiayaan dalam pelaksanaan program Gerakan Nagari Madani. Pelaksanaan program dilakukan semenjak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Berdasarkan pasal 3 mengatakan bahwa tujuan GNM dibentuk adalah

1. Optimalisasi pendidikan informal terutama Al-Quran (baca, pahami, amalkan, hafal)
2. Peningkatan peranan Mesjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat
3. Pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari
4. Peningkatan rasa kepedulian sosial, ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong
5. Penerapan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi khitabullah (ABS-SBK)
6. Peningkatan kesalehan individu dan sosial

Hasil pelaksanaan Gerakan Nagari Madani akan menghasilkan Tipologi nagari yang madani dibedakan dari level I sampai level V. Penetapan level nagari berdasarkan hasil atau skor yang di dapat nagari setiap tahun dari hasil penilaian nagari madani kepada semua nagari yang berjumlah 82 Nagari. Skor dalam menilai nagari ditetapkan berdasarkan Perbup No 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Pembagian level nagari dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. 1
 Hasil Assessment Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani
 Kabupaten Agam Tahun 2017-2019

Level Nagari Madani	Jumlah Nagari Berdasarkan Level			Nilai / Skor
	2017	2018	2019	
I	38	4	1	0-85
II	28	43	13	86-110
III	16	21	23	111-130
IV	-	13	37	131-170
V	-	1	8	171-215
Jumlah Nagari	82			

Sumber: Olahan Peneliti dari Modul Hasil Assessment Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani Kabupaten Agam Tahun 2017-2019

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa terdapatnya pembagian nagari yang terdiri dari level I sampai V. Peningkatan level oleh nagari berdasarkan dengan skor yang didapat nagari dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada pertama kali Gerakan Nagari Madani diumumkan tahun 2017 mendapatkan penolakan dari pemerintahan nagari dan masyarakat. Penolakan disebabkan oleh nagari yang beranggapan bahwa mereka tidak beragama. Permasalahan ini terjadi karena progress pelaksanaan dan pengarsipan data dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam yang mengatakan:

Penerbitan hasil penilaian pertama mendapatkan penolakan dari beberapa nagari, mereka beranggapan nagari mereka tidak beragama. Berbagai nagari setiap tahun memang memiliki

kegiatan keagamaan akan tetapi masih mendapatkan nilai yang rendah. Rendahnya nilai yang didapat karena nagari tidak punya kearsipan dalam mendata kegiatan yang dilakukan, padahal nagari harus tahu apa saja kegiatan yang dilakukan di nagari walaupun kegiatan tersebut bersumber dari masyarakat. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 10.48 WIB).

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa terdapat penolakan dari pemerintahan nagari, akan tetapi dalam perkembangannya GNM memberikan dampak positif kepada pemerintahan nagari di Kabupaten Agam dalam mengelola sumber daya nagari. Dampak ini di akibatkan karena program GNM memberikan kejelasan nagari dalam merumuskan program, memberdayakan masyarakat serta kekayaan nagari yang dimiliki. Beckmann (2001) mengatakan bahwa sumber daya nagari seperti pasar, masjid, dan mushala, tanah, hutan, sungai, kolam, danau, dan laut digunakan untuk menjadi sumber daya nagari (ulayat nagari), termasuk badan usaha dan property bergerak lainnya¹⁰.

Upaya meningkatkan penerapan Nagari Madani diprioritaskan untuk menjawab isu permasalahan yang marak di tengah masyarakat yaitu penyimpangan perilaku seksual, LGBT, kekerasan kepada perempuan dan anak. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dan adat yang diukur dengan berkurangnya kasus – kasus penyakit masyarakat, meningkatnya anak-anak yang bisa dan lancar baca tulis Al Quran serta meningkatnya kesholehan

¹⁰ Jendrius. 2011. Ayam Batino Lah Bakukuak: Otonomi Daerah Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol 1 (2) : 129

sosial. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam yang mengatakan:

Kabupaten Agam mengalami banyak permasalahan seperti maraknya tempat judi, KDRT, serta tidak ada penerapan agama dan adat di kehidupan masyarakat. Pada saat sekarang bisa di lihat bahwa banyak mamak yang tidak memperhatikan anak kamanakan mereka. Bahkan Kabupaten Agam sekarang tidak ada melahirkan cendekiawan. Karena hal itu menjadi salah satu landasan program dilaksanakan. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 10.48 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang di alami oleh Kabupaten Agam seperti maraknya tempat judi, KDRT, serta tidak diterapkannya adat dan agama menjadi landasan program GNM dilaksanakan di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam memiliki beberapa cendekiawan yang berpengaruh di Indonesia seperti Buya Hamka, Rasuna Said, Siti Manggopoh, dan sebagainya, akan tetapi pada saat ini mengalami kekurangan sumber daya cendekiawan yang berasal dari masyarakat asli Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan karena berbagai pengaruh negatif yang mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilaksanakanlah program GNM di setiap nagari di Kabupaten Agam.

Terdapat beberapa nagari yang mengalami perkembangan dalam mewujudkan nagari yang madani. Nagari Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang memiliki skor dan level tertinggi dalam pelaksanaan GNM di Kabupaten Agam. Prestasi sebagai Nagari Madani terbaik yang diperoleh berdasarkan capaian skor tertinggi di Kabupaten Agam. Bukan hanya itu prestasi tersebut diperoleh pada tahun 2019 merupakan capaian yang kedua kalinya, dimana tahun 2018 juga

memperoleh peringkat terbaik dengan mengalahkan 81 nagari lainnya di Kabupaten Agam dan nagari pertama yang berada di level tertinggi (Level Lima)¹¹.

Nagari Manggopoh juga mengalami banyak perkembangan dalam mewujudkan nagari madani. Perkembangan tersebut di tunjukkan sebagai nagari yang memiliki progress terbanyak di tahun 2019 dan langsung naik dari level I ke level VI dalam waktu satu tahun. Nagari Manggopoh dalam pelaksanaan GNM juga menciptakan bentuk pemerintahan nagari yang teratur, hal ini juga disampaikan Ridwan selaku Wali Nagari Manggopoh mengatakan:

“Perencanaan yang kami lakukan lebih bisa terfokus seperti pemberdayaan pemuda dalam meningkatkan keagamaan, peran perantau, dan menurunkan angka narkoba. Nagari Manggopoh melihat kriteria mana yang rendah dan akan berfokus pada kriteria tersebut bahkan akan kami anggar”. (Wawancara dengan Wali Nagari Manggopoh Kabupaten Agam. Pada tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 17:12).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya program GNM memberikan kontribusi dalam mengembangkan nagari. Hasil GNM yang didapat dipergunakan sebagai alat evaluasi bagi nagari di Kabupaten Agam. Setiap nagari dalam merumuskan program harus berlandaskan pada hasil GNM dalam mewujudkan nagari madani. Hal serupa juga di alami oleh Nagari Sungai Pua yang mana mengalami perubahan dalam membangun dan mengembangkan nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Pua dalam wawancara yang mengatakan:

Sebelumnya kami tidak ada melakukan pendataan secara menyeluruh dinagari. Setelah pelaksanaan GNM ini kami mulai mendata bebagai aspek dinagari seperti murid MDA, penghafal

¹¹ Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, 2019, Sungai Pua Nagari Madani Terbaik Di Kabupaten Agam, yang di akses melalui <http://www.nagari-sungaipua.com/berita-sungai-pua-nagari-madani-terbaik-di-kabupaten-agam.html>, pada 2 Agustus 2020, pukul 13.20 WIB.

AL ‘Quran, perantau dan sebagainya. Bahkan kami sekarang juga memperhatikan kedai teh talau atau sebagainya yang takutnya ada kegiatan judi. Bahkan sekarang banyak perkembangan yang kami alami dan itu berdampak baik bagi nagari. (Wawancara dengan Fiki Ananda sebagai Wali Nagari Sungai Pua, pada tanggal 07 Oktober 2020 pada pukul 1.30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GNM memberikan dampak yang signifikan dalam mengembangkan potensi nagari. Pemerintahan nagari mulai mendata kembali semua aspek yang dimiliki serta mengembangkannya. Bukan hanya itu Pemerintahan Nagari juga mulai memperhatikan berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat dan dapat mengatasinya. Akan tetapi tidak semua nagari mengalami perubahan dalam pelaksanaan GNM seperti yang terjadi di Nagari Koto Gadang VI Koto, yang mana sampai saat sekarang tidak mengalami perubahan dan perkembangan. Nagari Koto Gadang pada awal pelaksanaan sampai sekarang masih sebagai nagari level V di Kabupaten Agam dalam pelaksanaan GNM. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Nagari Koto Gadang IV Koto, yang mana mengatakan:

Memang benar kami berada pada level V dalam pelaksanaan GNM. hal itu disebabkan tidak melakukan dokumentasi diberbagai kegiatan yang kami lakukan. Sebenarnya setiap nagari itu ada melakukan kegiatan yang berkaitan dengan GNM akan tetapi mereka tidak mendata kegiatan itu untuk dinilai. (Wawancara dengan Okrido Sebagai Sekretaris Nagari Koto Gadang IV Koto, pada tanggal 15 Oktober 2020, pada pukul 9.30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang di alami di beberapa nagari adalah tidak melakukan pendataan atau dokumentasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan nagari dinilai tidak memiliki progress di setiap tahunnya.

Berdasarkan hal itu partisipasi nagari dalam mengembangkan dan melaksanakan program GNM sangat diperlukan, karena nagari merupakan sasaran program.

Pelaksanaan program GNM berdasarkan Perbup nomor 74 tahun 2016 Tentang Pedoman pelaksanaan GNM di Kabupaten Agam terdiri dari tahapan evaluasi dan pembinaan. Tahapan evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang bertugas dalam menganalisa dan menilai pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam selaku *leading sector*. Sedangkan pembinaan dilakukan oleh satuan tim pembina yang bertugas dalam memberikan pembinaan terhadap nagari untuk mendukung terlaksananya GNM. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan GNM di Kabupaten Agam merupakan program lintas sektoral dimana melibatkan semua OPD di kabupaten Agam.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, berfokus pada tahapan evaluasi. Dalam proses evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam juga berwenang dalam pemberian dukungan di bidang administrasi, pengorganisasian, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Gerakan Nagari Madani, melalui¹²;

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program, penataan organisasi dan tata laksana
- b) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

¹² Keputusan Bupati Agam Tahun 2019 Tentang Tim Pembina Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani Tahun 2019

- c) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, dan perlengkapan instrumen penilaian
- d) Pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga assessment dan pelaksanaan assessment.
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan.

Setiap OPD yang tergabung dalam satuan tim pembina yang berfokus dalam pemenuhan kegiatan di setiap indikator. Pada tahun 2019 pelaksanaan GNM dibagi atas beberapa divisi utama dalam mewujudkan Agama yang Madani. Tim pembina yang terbagi atas tiga divisi utama bertugas hanya memberikan pemberdayaan kepada nagari, akan tetapi pelaksanaan dan pembiayaan tetap dari pemerintahan nagari. Pada tahun 2019 juga dibentuk tim monitoring yang terdiri dari pejabat structural di kecamatan, OPD, dan tenaga ahli P3MD. Tim monitoring bertugas dalam mendampingi proses *assessment* Gerakan Nagari Madani.

Tabel 1. 2
Pembagian Divisi Tim Pembina Gerakan Nagari Madani

No.	Divisi	Aktor	Tupoksi
1	Gerakan Baliak Ka Surau Dan Kitabullah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pembangunan Perekonomian dan KESRA 2. Ka. Disdikbud 3. Ka. Dinas PUTR 4. Ka. Dinas Pertanian 5. Ka. Dinas Perkim 6. Ka. Dinas Arsip dan Pustaka 7. Kabag Kesra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pendidikan Informal terutama Al-Qur'an (baca, pahami, amalkan, hafal) 2. Peningkatan Peranan Masjid/Surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat. 3. Peningkatan jumlah jamaah shalat subuh. 4. Peningkatan jumlah pemotongan hewan qurban.

		8. Ketua Baznas Agam	5. Peningkatan jumlah Zakat, Infak dan Sedekah.
2	Gerakan Anti Pekat Dan Solidaritas Badunsana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BaKesbangpol 2. Ka. Bappeda 3. Ka. Dinas Lingk. Hidup 4. Ka. Dinas Sosial 5. Ka. Dinas Kesehatan 6. Ka. Disdalduk KBPPPA 7. Ka. Satpol PP dan Damkar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari. 2. Peningkatan rasa kepedulian sosial ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong. 3. Pembangunan simbol-simbol yang bertemakan syariat agama (stiker, spanduk, papan, billboard, megatron, videotron, prasasti, tugu, atau landmark). 4. Pengembangan lingkungan bersih atas partisipasi warga berbasis nagari (fasilitas pembuangan sampah, upaya sistematis, 3R, ada alat peraga / sosialisasi).
3	Gerakan Adat Budaya Tradisional Dan Limbago Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. DPMN 2. Ka. Disdikbud 3. Ka. Disparpora 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Adat, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan filosofi ABS-SBK. 2. Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat. 3. Pengembangan budaya berpakaian sesuai syariat agama.

Sumber; Struktur Tim Pembina Gerakan Nagari Madani Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa adanya keterlibatan semua lapisan pemerintahan di Kabupaten Agam sesuai dengan tupoksi mereka dalam menyukseskan program Nagari Madani yang berperan sebagai pembina

pelaksanaan program GNM oleh nagari. Pembagian divisi disebabkan agar adanya kejelasan dalam pembagian tugas dalam mencapai tujuan yang di harapkan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam yang mengatakan:

“Tim Pembina terdiri dari beberapa OPD di Kabupaten Agam, di tahun 2019 struktur Tim pembina terjadi perubahan dimana dibagi atas tiga divisi. Setiap divisi mencakup beberapa kriteria berdasarkan tupoksi mereka dalam mewujudkan Nagari Madani di Agam”. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 11.10 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap OPD di Kabupaten Agam saling berkontribusi dalam mewujudkan Agam madani. Setiap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan akan di laporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam selaku *leading sector* sebagai bahan pertimbangan dalam tahap evaluasi di tahun berikutnya. Bukan hanya itu Tim Pembina akan bergerak setelah adanya Analisa hasil evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, OPD dalam mewujudkan ketiga kegiatan yang telah ditentukan kurang sejalan dengan apa yang diharapkan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam yang mengatakan:

“Pembagian kerja sudah dibagi kepada OPD berdasarkan kriteria yang bermasalah, akan tetapi banyak OPD yang tidak sejalan selama ini”. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 14.31 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, permasalahan dimana tidak sejalan nya pelaksanaan yang dilakukan oleh beberapa OPD berakibat pada tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan oleh DPMN selaku *leading sector*. DPMN merupakan inti dari pelaksanaan pemberdayaan kepada pemerintahan nagari dan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi GNM dimulai dari DPMN melakukan rekrutmen tenaga *assessment* (assessor), peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK), pelaksanaan *assessment*, rapat pleno finalisasi hasil, pengumuman hasil *assessment* dan Analisa Hasil *Assessment*. Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019 juga dilakukan pelatihan bagi kader Gerakan Nagari Madani yang di tunjuk oleh nagari. Pembagian pelaksanaan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh DPMN yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Pelaksanaan Program Nagari Madani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam

No	Prosedur	Pelaksanaan	Aktor	Sasaran
1	Rekrutmen tim <i>assessment</i> (assessor)	Rekrutmen tenaga assessor dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Rekrutmen dilakukan kepada masyarakat melalui rekomendasi nagari dan kecamatan,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Pembentukan Tim <i>asement</i> Gerakan Nagari Madani
2	Bimtek tenaga <i>assessment</i>	Bimtek dilakukan setelah tim <i>assessment</i> terbentuk yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Pembicara atau pemberi materi dilakukan oleh tim ahli yang telah ditunjuk.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Tim <i>asement</i> Gerakan Nagari Madani

3	Pelatihan Kader Gerakan Nagari Madani	Pelatihan Kader di hadir sebanyak 82 orang peserta yang terdiri dari 1 orang utusan nagari. Pelatihan dilakukan selama 3 hari kalender.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Kader Gerakan Nagari Madani
4	Pelaksanaan <i>assessment</i>	Penilaian nagari dilakukan selama 6 hari kalender.	Tim assessor dan tim monitoring	Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam
5	Rapat pleno finalisasi hasil	Rapat pleno dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama tim <i>assessment</i> dalam sinkronisasi data observasi dengan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan penilaian.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dan Tim <i>assessment</i> , dan Wali Nagari	Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam
6	Pengumuman Hasil Evaluasi	Pengumuman hasil evaluasi dilakukan di depan kantor Bupati Kabupaten Agam tanggal 17 Agustus. Nagari yang mengalami peningkatan akan diberikan <i>reward</i> oleh pemerintah Kabupaten	Pemerintahan Kabupaten Agam	Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam
7	Analisa Hasil Assessment	Analisa hasil bertujuan sebagai bahan rekomendasi bagi nagari serta sebagai bahan perencanaan pembinaan oleh Tim Pembina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti. Dari Dokumen Modul Hasil Assessment Pelaksanaan Gerakan nagari Madani Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel 1.3 menjelaskan bagaimana pelaksanaan program GNM di Kabupaten Agam yang dimulai dari rekrutmen *assessment* sampai dengan menganalisa hasil *assessment* yang telah dilakukan. Perencanaan kegiatan di

tetapkan dan dirancang oleh DPMN Kabupaten Agam sebagai *leading sector*. Perencanaan kegiatan juga di laksanakan melalui rapat antara DPMN, Wakil Bupati, dan OPD saat penajaman forum OPD. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

“Perencanaan kegiatan program GNM di rancang oleh DPMN dengan membuat *time schedule* kegiatan, dan juga di rapatkan dengan Wakil Bupati, dan OPD saat penajaman forum OPD. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 25 Juni 2020 pada pukul 17.50 WIB, melalui *WhatsApp*).

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan kegiatan yang di rancang oleh DPMN dengan membuat *time schedule* pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari seleksi tenaga *assessment* sampai Analisa hasil. Seleksi tenaga *assessment* dilakukan oleh DPMN selaku *leading sector* dan yang berwenang serta bertanggung jawab dalam mengelola SDM. Tenaga *assessment* berjumlah 60 orang yang dipilih melalui rekomendasi dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam. Seleksi Tenaga *assessment* dilakukan oleh DPMN Kabupaten Agam dari rekomendasi kecamatan. Pada pelaksanaan tahun 2019 tidak dilakukan tahapan seleksi seperti tahun pelaksanaan sebelumnya. Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2019 seleksi *assessment* tidak ada, dikarenakan di tahun 2019 kebetulan rekomendasi yang bersedia menjadi tim *assessment* berjumlah 60 orang atau sudah memenuhi kuota yang telah ditetapkan. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 13 Mei 2020 pada pukul 15.46 WIB, melalui *WhatsApp*).

Berdasarkan wawancara tersebut, pelaksanaan di tahun 2019 tidak melakukan tahapan seleksi yang dikarenakan jumlah rekomendasi dari kecamatan sudah sesuai dengan kuota atau jumlah yang ditetapkan. Setelah seleksi tenaga *assessment* dilakukan, maka selanjutnya diadakan Bimtek kepada tim *assessment*. Pembicara dalam pelaksanaan Bimtek dilakukan oleh Tim Ahli dan Wakil Bupati Kabupaten Agam. Bimtek melibatkan Tenaga *Assessment* sebanyak 60 orang dan tim monitoring sebanyak 32 orang. Pelaksanaan Bimtek bertujuan dalam meningkatkan kapasitas tim pelaksana Gerakan Nagari Madani¹³. Berdasarkan wawancara dengan tim ahli GNM di Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

“Sebelum para assessor observasi ke lapangan dan melakukan penilaian terhadap nagari maka harus diberikan pembekalan. Pembekalan dilakukan sewaktu Bimtek yang menjelaskan bagaimana konsep GNM, cara melakukan penilaian, dan sebagainya”. (Wawancara dengan Henmaidi selaku tim ahli GNM di Kabupaten Agam Pada Tanggal 02 Februari 2020 pada pukul 14.15 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, pelaksanaan Bimtek bertujuan dalam meningkatkan kapasitas tim *assessment* sebelum melakukan penilaian terhadap semua nagari di Kabupaten Agam. Pada tahun 2019 juga diadakan pelatihan kepada kader Gerakan Nagari Madani yang bertujuan dalam meningkatkan kapasitas kader dalam mewujudkan nagari yang madani. DPMN dalam memaksimalkan pelaksanaan di tingkat nagari maka setiap nagari di tuntut dalam mengangkat kader Gerakan Nagari Madani. Kader ditunjuk oleh nagari dengan tujuan dapat menggerakkan pelaksanaan nagari madani, membuat roadmap dan rencana tindak

¹³ Modul Hasil Evaluasi (Assessment) Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani Kabupaten Agam Tahun 2019

lanjut dalam menyukseskan program, dan membantu nagari dalam dokumentasi pelaksanaan GNM di nagari demi kepentingan penilaian dan arsip nagari.

Pelaksanaan *assessment* dilakukan oleh tim assessor ke setiap nagari-nagari yang dilakukan selama 6 hari kalender. Pelaksanaan dilakukan oleh tim assessor dibagi atas beberapa koordinator dan anggota dengan pembagian kerja berdasarkan beberapa wilayah yang ditetapkan oleh DPMN. Pelaksanaan awal dilakukan dengan audiensi di kantor kecamatan yang mana wali nagari melakukan ekspose perkembangan program Gerakan Nagari Madani. Tim monitoring wajib hadir dan mendampingi nagari dalam penilaian yang dilakukan di kecamatan¹⁴. Setelah melakukan audiensi, tim assessor akan mengevaluasi bahan ekspose dari nagari dan pada hari berikutnya dilakukan observasi ke lapangan.

Setelah dilakukannya penilaian maka akan diadakan Rapat Pleno Finalisasi Hasil yang dilakukan oleh Tim Assessor, Tim Monitoring, DPMN, dan Wali nagari. Rapat Pleno membahas hasil temuan di lapangan selama *assessment* serta menentukan skor atau point yang telah didapatkan oleh nagari. Hasil dari Rapat Pleno akan menjadi rekomendasi dan solusi bagi nagari dalam melaksanakan Gerakan Nagari Madani¹⁵. Bukan hanya itu Rapat Pleno juga akan menghasilkan level nagari berdasarkan skor yang telah didapat selama pelaksanaan GNM.

Nagari yang berprestasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus, setelah upacara penurunan bendera di lapangan kantor gubernur Kabupaten Agam. Dalam memberikan motivasi maka setiap nagari yang mengalami perkembangan akan

¹⁴ Ibid

¹⁵ ibid

mendapatkan penghargaan oleh pemerintahan Kabupaten. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Bupati Kabupaten Agam. Penghargaan yang diberikan dibedakan dari kategori progress dan skor tertinggi. Nagari Sungai Pua merupakan daerah yang memiliki skor tertinggi tahun 2017 sampai dengan sekarang. Nagari Sungai Pua pada saat sekarang menempati posisi pertama dan level lima dalam pelaksanaan GNM.

Gambar 1. 1
Penghargaan Progress Tertinggi dan Skor Terbanyak Tahun 2019



Sumber; Arsip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam

Berdasarkan Gambar 1.2 terdapat 3 nagari yang mendapatkan penghargaan skor dan progress terbanyak di tahun 2019. Nagari yang mendapatkan penghargaan skor tertinggi adalah Sungai Pua, Kapau, dan Koto Tangah. Sedangkan progress terbanyak di dapatkan oleh Manggopoh, Ampang Gadang, dan Maninjau. Setelah hasil diumumkan, DPMN Kabupaten Agam akan menganalisa hasil assessment yang telah didapat nagari, yang bertujuan dalam pelaksanaan untuk tahun

berikutnya dan sebagai bahan pembinaan, pendampingan dan monitoring oleh tim pembina kepada nagari-nagari di Kabupaten Agam.

Pembinaan, pendampingan dan monitoring dilakukan oleh Tim pembina setelah hasil *assessment* dikeluarkan. Hasil *assessment* akan menjadi bahan perencanaan aksi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pembina. Setelah dilakukannya pembinaan, pendampingan, dan monitoring oleh tim pembina berdasarkan divisi dan tupoksi masing-masing, maka DPMN akan mendokumentasikan hasil dari pembinaan, pendampingan, dan monitoring ke semua nagari di Kabupaten Agam.

Pelaksanaan program GNM memerlukan manajemen kinerja dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen kinerja terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dimulai dari masukan, proses kinerja, manfaat dan dampak kinerja. DPMN sebagai inti dari pelaksanaan GNM harus mengakomodir sumber daya yang dimiliki agar kinerja yang dihasilkan maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk menunjang kinerja DPMN dalam menjalankan program Gerakan Nagari madani membutuhkan masukan berupa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mendukung pelaksanaan program. Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi¹⁶.

Pelaksanaan program Gerakan Nagari Madani oleh DPMN Kabupaten Agam dilakukan oleh tim atau tenaga *assessment* yang dibentuk melalui rekrutmen

¹⁶ Nasrullah Nursam, 2017, Manajemen Kinerja, *Journal of Islamic Education Management*, Vol 2 (2): 171

yang dilakukan oleh DPMN dari rekomendasi nagari dan kecamatan serta dari kader yang ditunjuk oleh nagari. Akan tetapi dalam pelaksanaan dihadapkan pada kurangnya jumlah dan kapabilitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

“Permasalahan SDM berada pada jumlah dan kualitas SDM, dimana tidak sesuai dengan harapan pada rekrutmen tim Pada awal rekrutmen tim yang dibutuhkan berjumlah 80 orang akan tetapi yang terpilih hanya 60 orang dimana kualitas SDM kurang berkualitas. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 10.48 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, program ini dijalankan oleh 60 orang dan kurang berkualitas dalam pelaksanaannya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukanlah Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam meningkatkan pemahaman bagi setiap tenaga *assessment* dalam melaksanakan penilaian dan pada saat observasi lapangan.

Selain SDM, dalam pelaksanaan program juga membutuhkan masukan lainnya yaitu anggaran, peralatan penunjang kegiatan dan sebagainya. Anggaran akan sangat mempengaruhi bagaimana pencapaian tujuan. Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Drs. Welfizar, M. Si mengatakan bahwa dukungan dana terhadap Nagari Madani dalam APBD Kabupaten Agam tahun 2018 sebesar Rp 12 Miliar, dimana anggaran tersebut terbagi pada 10 OPD¹⁷. Anggaran yang dialokasikan

¹⁷ Taofiq Rauf, 2018, Gerakan Nagari Madani Prioritas RKPD Agam 2019, *Info Publik*, di akses dari (<http://infopublik.id/read/260139/gerakan-nagari-madani-prioritas-rkpd-agam-2019.html>), pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 21.20 WIB

dinilai kurang oleh DPMN sebagai pelaksana *assessment*. Kepala Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2017 anggaran pelaksanaan sebanyak Rp 250 juta, tahun 2018 sebanyak 170 juta, dan pada tahun 2019 sebanyak 330 juta. Anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan dinilai masih kurang dimana berdampak pada pelaksanaan dan penetapan jumlah tenaga *assessment* yang diharapkan setiap nagari memiliki tenaga 1 tenaga *assessment*. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 11.20 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggaran berdampak pada kuota tenaga *assessment* dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam kurangnya anggaran juga berdampak pada tidak adanya pelatihan kader di nagari di tahun 2020. Masukan lainnya yaitu peralatan dan perlengkapan dalam memaksimalkan kegiatan. Peralatan dan Perlengkapan di siapkan oleh tenaga *assessment* itu sendiri seperti laptop, motor dan sebagainya. Jadi dalam rekrutmen tenaga *assessment* diutamakan pada masyarakat yang mempunyai peralatan dan perlengkapan pribadi yang mendukung pelaksanaan.

Manajemen kinerja juga harus mempertimbangkan proses pelaksanaan program. Proses diawali dengan perencanaan tujuan yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah visi dan misi organisasi. Visi Kabupaten Agam periode 2016-2021 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani. Program GNM di Kabupaten Agam merupakan program prioritas Kabupaten Agam dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Agam. Hal ini juga disampaikan oleh Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi

Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

Program GNM itu merupakan program prioritas pertama Kabupaten Agam. Perencanaan tujuan program GNM dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Agam dan juga tercantum dalam RPJMD. Akan tetapi dalam pelaksanaannya DPMN ditunjuk sebagai instansi yang bertanggung jawab. (Wawancara dengan Irja Padriano sebagai Ka Seksi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN Kabupaten Agam Pada Tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 11.20 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya perencanaan tujuan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Agam. Bukan hanya itu DPMN Kabupaten Agam bekerja dalam mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan yang dilakukan oleh DPMN berfokus dalam evaluasi program terhadap semua nagari di Kabupaten Agam. Hasil evaluasi juga digunakan sebagai bahan pertimbangan tim pembina bekerja dalam mendukung jalannya program di nagari.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi adalah pemerintahan nagari masih kurang dalam kearsipan atau pendataan kegiatan yang berkaitan dengan Gerakan Nagari Madani, padahal nagari tersebut telah melakukan banyak kegiatan. Permasalahan tersebut berakibat pada kinerja tim evaluasi yang mana harus memberikan penilaian dan mengakibatkan penurunan nilai terhadap nagari. Akan tetapi, pelaksanaan Gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam setiap nagari mengalami perkembangan walaupun masih terdapat permasalahan di beberapa indikator.

Tabel 1. 4
Kondisi Nagari yang bermasalah Berdasarkan Kriteria dan Indikator
di Kabupaten Agam

7 KRITERIA 43 INDIKATOR BERMASALAH			JUMLAH NAGARI		
			2017	2018	2019
K.1 Pendidikan Informal terutama Al-qur'an	I.1	Pengurangan buta baca tulis Al-Quran.	55	19	22
	I.2	Peningkatan jumlah penghafal Al-Quran.	56	36	16
	I.3	Tersedianya Rumah Quran/rumah tahfidz di nagari.	42	13	10
	I.4	Terlaksananya Maghrib mengaji	9	1	0
	I.5	Terlaksananya khatam Quran dan MTQ di nagari	18	4	5
	I.6	Tercapainya APK (angka partisipasi kasar) TPA/MDA	17	5	3
K.2 Peningkatan Peranan Mesjid/Surau	I.1	Terlaksananya shalat 5 waktu	56	18	18
	I.2	Peningkatan dan Pengembangan sarana dan prasarana TPQ/TPA/MDA	56	17	6
	I.3	Penyelenggaraan peringatan HBI	6	0	0
	I.4	Penyelenggaraan Kegiatan Remaja Mesjid dan Surau dan Didikan Subuh	73	46	24
	I.5	Majelis Ta'lim	7	3	1
	I.6	Penyelenggaraan Pemberdayaan sosial keagamaan	59	56	42
	I.7	Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan sosial ekonomi {Unit Pengumpul Zakat (UPZ), koperasi syariah, Badan Mal Wattamwil (BMT)}	62	51	47
	I.8	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.	37	22	7
	I.9	Pembentukan kepengurusan Mesjid	49	36	14
K.3 Pelaksanaan perlindungan atas kampung	I.1	Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba	37	12	14
	I.2	Pengawasan terhadap peredaran Minuman keras	49	29	8
	I.3	Penurunan kasus pergaulan bebas	34	10	3
	I.4	Penurunan kasus perjudian	42	42	42
	I.5	Penurunan tingkat kriminalitas	46	14	9
K.4 Peningkatan rasa kepedulian sosial ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong	I.1	Penurunan angka perceraian	40	18	6
	I.2	Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada anak	16	14	3
	I.3	Pengembangan sikap gotong royong	47	22	5
	I.4	Penurunan angka anak putus sekolah	50	27	10
	I.5	Penurunan jumlah keluarga miskin	49	44	23
	I.6	Pengembangan kegiatan atau forum yang meningkatkan persaudaraan dalam nagari	32	22	6

	I.7	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat rantau	43	42	13
K.5 Penerapan Adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan filosofi ABS SBK	I.1	Peningkatan eksistensi ninik mamak	11	8	1
	I.2	Peningkatan kapasitas ninik mamak	25	18	9
	I.3	Peningkatan kapasitas ampek jinih / imam khatik suku	27	21	21
	I.4	Pengembangan program / kegiatan seni budaya	43	38	20
	I.5	Pengembangan program / kegiatan olahraga	52	44	28
K.6 Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat	I.1	Peningkatan peran serta KAN	53	44	36
	I.2	Peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia Nagari	62	61	59
	I.3	Peningkatan peran serta Bundo Kanduang dan Organisasi Kewanitaan.	68	58	44
	I.4	Peningkatan peran serta Organisasi Kepemudaan di nagari	61	62	45
	I.5	Peningkatan peran serta Organisasi Keagamaan	71	71	48
K.7 Peningkatan kesalehan Individu dan Sosial	I.1	Peningkatan jumlah jamaah shalat subuh	77	42	19
	I.2	Peningkatan jumlah pemotongan hewan qurban	43	37	16
	I.3	Peningkatan jumlah Zakat, Infak dan Sedekah	70	58	35
	I.4	Pengembangan budaya berpakaian sesuai syariat agama	9	0	1
	I.5	Pembangunan simbol-simbol yang bertemakan syariat agama.	76	79	71
	I.6	Pengembangan lingkungan bersih atas partisipasi warga	72	65	59

Sumber; Modul Assessment Gerakan Nagari Madani Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa masih terdapat nagari yang bermasalah di beberapa indikator pelaksanaan. Pemberdayaan yang dilakukan kepada setiap nagari memerlukan manajemen kinerja yang baik dalam pelaksanaannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dituntut dapat bekerja maksimal dalam mendukung dan memberdayakan nagari dengan indikator yang telah ditetapkan.

Hasil dalam pelaksanaan manajemen kinerja berkaitan dengan bagaimana keluaran dari kinerja organisasi. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja

organisasi, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Hasil kerja yang dicapai organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang di harapkan. Keluaran dapat lebih besar atau lebih rendah dari tujuan yang telah ditetapkan¹⁸. Hasil dari pelaksanaan program adalah adanya laporan Hasil *Assessment* Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani Kabupaten Agam bagi semua nagari di setiap tahun. Laporan *assessment* bertujuan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Bukan hanya itu laporan *assessment* juga menjadi acuan tim pembina dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada nagari, serta sebagai bahan acuan perumusan program yang akan di tetapkan dan lakukan oleh semua nagari.

Manajemen Kinerja juga harus mempertimbangkan bagaimana manfaat atau dampak dari hasil kerja yang telah dilakukan oleh organisasi. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif ataupun negative bagi organisasi¹⁹. Dalam perkembangannya pelaksanaan GNM memberikan dampak positif dalam pelaksanaannya. Keberhasilan dan perkembangan program GNM di beberapa nagari menjadi motivasi pemerintahan dan masyarakat nagari dalam mewujudkan nagari yang madani. Bukan hanya itu dalam mewujudkan nagari madani adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen tenaga assessor (*assessment*), walaupun dalam rekrutmen masih banyak masyarakat yang dinilai kurang berkualitas atau berpengalaman. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka

¹⁸ Sri Sundari, Manajemen Kinerja, Universitas Pertanian, Bogor, 2019, hlm 27

¹⁹ Wibowo, Manajemen Kinerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23

pembentukan kader GNM oleh nagari merupakan sarana masyarakat agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan GNM.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka peneliti tertarik ingin melihat lebih dalam bagaimana Manajemen Kinerja organisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam dalam melaksanakan program Gerakan Nagari Madani. Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini peneliti akan membahas tentang **Manajemen Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam dalam Pelaksanaan Program Gerakan Nagari Madani.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang ada pada latar belakang maka dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan: Bagaimana Manajemen Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Nagari Madani.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan maka penelitian ini bertujuan dalam menganalisis Manajemen Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Agam dalam program Gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, serta diharapkan bisa memberikan

informasi berupa hasil kajian kepada instansi terkait manajemen kinerja. Bukan hanya itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baik kepada instansi pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan Gerakan Nagari Madani.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan Administrasi Publik, terkait Manajemen Kinerja. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik dan lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

